

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan dasar manusia adalah memenuhi kebutuhan pangannya. Pemenuhan kecukupan pangan merupakan investasi pembentukan sumber daya manusia yang lebih baik dan prasyarat bagi pemenuhan hak-hak dasar lainnya seperti pendidikan, pekerjaan, dan lainnya (Dewan Ketahanan Pangan, 2015). Mencapai, meningkatkan dan mempertahankan ketahanan pangan yang berkelanjutan telah menjadi isu global dan perhatian semua negara. Mewujudkan ketahanan pangan yang kokoh, mandiri dan berdaulat merupakan keinginan pemerintah dan masyarakat Indonesia, yang tercermin dengan terbitnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan. Oleh karena itu, upaya untuk membangun ketahanan pangan yang kokoh selalu menjadi fokus utama pembangunan pertanian nasional (Suryana, dkk, 2014).

Pengertian ketahanan pangan yang telah diterima secara luas oleh praktisi maupun akademisi adalah semua orang memiliki akses sepanjang waktu untuk memenuhi kebutuhan pangan agar hidup produktif dan sehat (FAO, 1997). Dalam konteks rumah tangga, didasarkan pada konsep *entitlement* atau kemampuan untuk menguasai pangan seperti yang dikemukakan Sen (1981) dalam (Maxwell, S dan T.R. Frankenberger, 1992). Sedangkan dalam UU No.18 Tahun 2012 memberikan pengertian ketahanan pangan (*food security*) adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem, yang terdiri dari tiga komponen utama (sub sistem) yaitu ketersediaan pangan (*food availability*), keterjangkauan (*food accessibility*), dan pemanfaatan pangan (*food utilization*). Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dan interaksi dari ketiga sub sistem tersebut (Chung, et al, 1997). Ketersediaan pangan yang cukup dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang memadai merupakan dua unsur

pokok dalam ketahanan pangan, yang mutlak dipenuhi untuk mencapai derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. (Arifin, 2004). Aksesibilitas pangan atau akses pangan oleh masyarakat adalah kondisi penguasaan sumberdaya (teknologi, finansial, alam, manusia) yang cukup untuk memperoleh dan/ atau ditukarkan untuk memenuhi kecukupan pangan (Bappenas, 2010). Kemampuan untuk mengakses makanan bertumpu pada dua pilar yaitu akses ekonomi dan akses fisik. Akses ekonomi ditentukan oleh pendapatan, harga pangan dan ketersediaan, sedangkan akses fisik ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas infrastruktur, termasuk pelabuhan, jalan, rel kereta api, fasilitas komunikasi dan penyimpanan makanan, pasar dan instalasi lainnya (FAQ, IFAD and WFP, 2013).

Salah satu agenda Nawa Cita Pembangunan Nasional adalah program peningkatan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan dijabarkan sebagai bentuk kemampuan dalam mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, pengaturan kebijakan pangan oleh bangsa sendiri, peningkatan kemampuan untuk melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan terutama petani. Kementerian Pertanian menjabarkan sasaran pembangunan tersebut dalam rencana strategis tahun 2015-2019 yaitu 1) pencapaian swasembada padi, jagung, dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula; 2) peningkatan diversifikasi pangan; dan 3) peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor (Kementerian Pertanian, 2014).

Peningkatan produksi pangan merupakan salah satu keberhasilan pembangunan ketahanan pangan di Indonesia. Tetapi peningkatan produksi pangan tersebut tidak diikuti oleh penanganan kerawanan pangan masyarakat. Tingkat kerawanan pangan merupakan indikator utama program ketahanan pangan. Jumlah penduduk rawan pangan masih cukup besar dan bahkan cenderung meningkat. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa ketersediaan pangan pada tingkat makro ternyata tidak serta merta dapat mengatasi kerawanan pangan. Kerawanan pangan berkaitan dengan tingkat kemampuan masyarakat untuk dapat mengakses pangan. Kemampuan akses masyarakat terhadap pangan, selain ditentukan oleh faktor ketersediaan juga dipengaruhi oleh distribusi pangan, daya beli masyarakat, perilaku konsumsi masyarakat dan pengetahuan masyarakat

akan gizi. Agar keberhasilan pembangunan pangan dapat sejalan dengan penurunan masyarakat rawan pangan diperlukan reorientasi pembangunan pangan dengan memperhatikan aspek kerawanan pangan (Badan Ketahanan Pangan, 2017).

Kerawanan pangan merupakan refleksi penduduk tidak dapat mengakses pangan, yang tidak diinginkan dalam pembangunan pangan di negara manapun, karena kerawanan pangan tidak saja berpengaruh terhadap kerawanan gizi, tetapi dapat menyebabkan kerawanan sosial, politik dan keamanan (Ariani, dkk, 2008). Kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu, dalam memenuhi kebutuhan pangannya yang berdampak bagi kesehatan masyarakat merupakan indikator terjadinya kerawanan pangan (Ariningsih Ening dan H.P.S Rachman, 2008). Terdapat dua bentuk kerawanan pangan, yaitu kronis dan transitori. Ketidakcukupan pangan secara menetap akibat ketidakmampuan rumah tangga untuk memperoleh pangan yang dibutuhkan, yang disebabkan kemiskinan, disebut kerawanan pangan kronis, sedangkan kondisi penurunan akses terhadap pangan yang dibutuhkan rumah tangga secara temporer, seperti adanya bencana alam disebut kerawanan pangan transitori (Setiawan, 2004).

Angka rawan pangan merupakan gambaran situasi tingkat aksesibilitas pangan masyarakat yang dicerminkan dari tingkat kecukupan gizi masyarakat, yang diukur dari Angka Kecukupan Gizi (AKG). Angka Kecukupan Gizi pada tingkat konsumsi menurut Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) pada tahun 2012 menjadi 2150 kkal/ kapita/hari. Penduduk suatu daerah dikatakan sangat rawan jika banyak penduduknya yang sehari mengkonsumsi kalori kurang dari 70 persen dari AKG, rawan jika banyak penduduknya yang seharusnya mengkonsumsi kalori 70 – 89.9 persen dari AKG, dan tahan pangan jika daerah tersebut banyak penduduknya yang sehari mengkonsumsi kalori lebih 90 persen dari AKG. Jumlah penduduk yang mengalami kerawanan pangan di Indonesia selama lima tahun (2011-2015) masih tinggi, dan memperlihatkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2011 penduduk yang mengalami kerawanan pangan atau tidak tahan pangan sebanyak 46,47 persen, meningkat menjadi 50,10 persen pada tahun 2015. Sedangkan pada periode tersebut ketersediaan pangan ditingkat

nasional/regional telah mencapai 3.200 kkal/kapita/hari dan protein 90 gram/kapita/hari. (Badan Ketahanan Pangan, 2017).

Ketersediaan pangan yang cukup di suatu wilayah dapat dijadikan indikator kemampuan pemenuhan konsumsi pangan masyarakat. Artinya pada daerah yang mempunyai tingkat ketersediaan pangan yang tinggi/baik, cenderung akan memberikan gambaran kondisi konsumsi pangan yang lebih baik (Suhardjo, dkk, 2006). Jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi (ketersediaan pangan) selama periode 2013 hingga 2017 di Provinsi Riau rata-rata mencapai 3.254 Kkal/kapita/hari (Tabel 1.1). Jumlah pangan yang tersedia (ketersediaan pangan) di provinsi Riau masih didominasi dari pasokan pangan (perdagangan pangan), karena produksi pangan daerah baru dapat memenuhi 35-40 persen total kebutuhan pangan penduduk. Jumlah pangan yang tersedia seperti beras, telur, buah-buahan dan sayuran di Provinsi Riau didominasi oleh pasokan dari luar daerah seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi dan Sumatera Selatan, dan perdagangan antar pulau (Dinas Ketahanan Pangan Riau, 2017). Artinya dari segi ketersediaan pangan di provinsi Riau tidak menunjukkan permasalahan, karena telah melampaui angka ketersediaan pangan hasil WKNPG 2012 yakni 2.400 Kkal/Kapita/Hari.

Ketersediaan pangan yang tinggi di Provinsi Riau tersebut tidak memberikan gambaran konsumsi pangan yang lebih baik, karena rata-rata konsumsi pangan penduduk selama periode tersebut mencapai 1.992 Kkal/kapita/hari, masih dibawah angka kecukupan energi yang dianjurkan menurut Widya Karya Pangan dan Gizi Nasional tahun 2012 yakni 2.150 Kkal/Kapita/Hari (Tabel 1). Selain itu kualitas konsumsi pangan penduduk Riau belum baik, meskipun menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya, karena rata-rata skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada konsumsi pangan baru menjcapi 76,1. Upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan penduduk dapat diperbaiki melalui meningkatkan konsumsi kelompok pangan umbi-umbian, kacang-kacangan, pangan hewani (ikan, telur, daging), sayur dan buah (Gevisioner, dkk, 2015). Bukti empiris ini menunjukkan bahwa jumlah pangan yang tersedia yakni rata-rata per tahun sebesar 3.254 Kkal/kapita/ hari belum dapat semuanya

dimanfaatkan atau diakses oleh masyarakat, karena baru mencapai 1.992 Kkal/kapita/hari.

Tabel 1. Perkembangan Rata-Rata Ketersediaan Pangan dan Konsumsi Pangan Penduduk di Provinsi Riau Tahun 2013-2017

No	Tahun	Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hari) ¹⁾	Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hari) ²⁾
1.	2013	3.363	1.860/
2.	2014	3.250	1.893
3.	2015	3.326	2.061
4.	2016	3.162	2.033
5.	2017	3.168	2.112

Sumber : 1) DKP Riau; 2) : BPS, Riau ;

Kondisi masih rendahnya tingkat akses pangan oleh penduduk di Riau juga dapat dilihat dari masih tingginya persentase penduduk yang mengalami rawan pangan karena penduduk rawan pangan merupakan gambaran ketidakmampuan rumah tangga maupun individu untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Persentase penduduk yang mengalami kerawanan pangan masih relatif tinggi. Pada tahun 2017, persentase penduduk yang mengalami sangat rawan dan rawan pangan mencapai 49,96 persen (Tabel 2) (Badan Ketahanan Pangan RI, 2018). Dari hasil pemantauan status gizi tahun 2017 menunjukkan bahwa di Riau masih terdapat 4,2 persen balita yang mengalami gizi buruk, 14,0 persen gizi kurang dan terdapat 29,7 mengalami *stunting* (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Tabel 2. Perkembangan Rata-Rata Ketersediaan Pangan dan Persentase Penduduk Rawan Pangan di Provinsi Riau Tahun 2013-2017

No	Tahun	Ketersediaan Energi (Kal/Kap/Hari) ¹⁾	Penduduk Rawan Pangan (%) ²⁾
1.	2013	3.363	53,31
2.	2014	3.250	51,73
3.	2015	3.326	49,89
4.	2016	3.162	49,82
5.	2017	3.168	49,96

Sumber : 1) DKP Riau; 2) : BKP, RI

Tabel 1. dan Tabel 2 memberikan gambaran bahwa jumlah pangan yang tersedia di provinsi Riau belum dapat sepenuhnya dijangkau oleh masyarakatnya. Diduga hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan

masyarakat untuk menjangkau pangan yang tersedia. Seperti yang dikemukakan oleh Maxwell & Frankerberger (1992) bahwa akses pangan rumah tangga dipengaruhi oleh sumber pendapatan, sumber kredit modal, dan strategi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Artinya semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat akan semakin baik akses pangannya.

Peningkatan pengeluaran per kapita dapat mengindikasikan terjadinya peningkatan pendapatan per kapita, oleh sebab itu dalam perhitungan pendapatan per kapita di Indonesia menggunakan pendekatan pengeluaran per kapita (BPS Riau, 2018). Pada tahun 2017, rata-rata pengeluaran per kapita riil per tahun Provinsi Riau mencapai Rp. 10,677 juta. Pengeluaran per kapita riil Provinsi Riau ini lebih rendah dibanding pencapaian pengeluaran riil Nasional Rp. 11,059 juta (Pemerintah Provinsi Riau, 2019). Bukti empiris di Provinsi Riau menunjukkan bahwa pada daerah yang mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita tinggi, masih ditemukan jumlah persentase penduduk yang mengalami rawan pangan yang tinggi, seperti pada Kabupaten Siak, Kampar, kota Pekanbaru dan kota Dumai, sebaliknya terjadi di Kabupaten Pelalawan, dengan pengeluaran perkapita tinggi, jumlah penduduk rawan pangan relatif rendah (Tabel 3).

Tabel 3. Pengeluaran Per Kapita dan Penduduk Rawan Pangan di Provinsi Riau Tahun 2017

No	Kabupaten / Kota	Pengeluaran*) (Rp.Juta/ Kap/Th)	Penduduk Rawan Pangan (%)
1	Kuantan Singingi	10,476	51,91
2	Indragiri Hulu	10,481	54,99
3	Indragiri Hilir	10,254	34,70
4	Pelalawan	11,894	29,70
5	Siak	12,119	53,86
6	Kampar	11,128	63,23
7	Rokan Hulu	9,608	43,33
8	Bengkalis	11,460	47,12
9	Rokan Hilir	9,316	49,09
10	Kepulauan Meranti	7,978	57,41
11	Pekanbaru	14,778	54,91
12	Dumai	12,063	56,16
	Provinsi Riau	10,677	49,96

Sumber : *)Pemerintah Provinsi Riau (2019) dan BKP Pusat (2018).

Begitu juga pada daerah-daerah yang menjadi daerah sentra produksi pangan khususnya beras, seperti Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Siak, dan

Rokan Hilir, jumlah penduduk mengalami rawan pangan juga relatif tinggi (Tabel 4). Produksi beras di Riau pada tahun 2017 mencapai 229.468 ton. Dari aspek kontribusi beras yang tertinggi terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 60.323 ton (26,29 persen), kemudian disusul kabupaten Rokan Hilir sebanyak 36.537 (15,92 persen). Konsumsi beras pada tahun 2017 mencapai 695.752 ton. Dengan rasio produksi dan konsumsi beras baru mencapai 0,33. Dengan kata lain, kebutuhan konsumsi beras belum dapat dipenuhi produksi yang dihasilkan petani Riau, sehingga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras masyarakat dipasok dari daerah lain, terutama Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, dan provinsi lainnya serta Malaysia. Kemampuan petani menghasilkan beras lebih 50 persen dari kebutuhan konsumsi penduduk kabupaten/kota hanya terdapat pada kabupaten Indragiri Hilir, Kuantan Singingi dan Rokan Hilir (Pemerintah Provinsi Riau, 2019).

Tabel 4. Produksi Beras dan Persentase Penduduk Rawan Pangan di Provinsi Riau Tahun 2017

No	Kabupaten / Kota	Produksi Beras (Ton)	Konsumsi Beras (Ton)	Rasio Produksi dan Konsumsi Beras	Penduduk Rawan Pangan (%)
1	Kuantan Singingi	27.648	33.567	0,82	51,91
2	Indragiri Hulu	7.203	44.506	0,16	54,99
3	Indragiri Hilir	60.323	75.473	0,80	34,70
4	Pelalawan	20.443	45.853	0,45	29,70
5	S i a k	21.975	48.636	0,45	53,86
6	Kampar	18.207	86.984	0,21	63,23
7	Rokan Hulu	19.540	67.006	0,29	43,33
8	Bengkalis	17.857	58.424	0,30	47,12
9	Rokan Hilir	36.537	71.025	0,51	49,09
10	Kepulauan Meranti	6.915	19.155	0,36	57,41
11	Pekanbaru	14	114.019	0,00	54,91
12	D u m a i	3.076	31.103	0,10	56,16
Provinsi Riau		229.468	695.752	0,33	49,96

Sumber : Pemerintah Provinsi Riau (2019)

Kondisi tersebut diatas menggambarkan bahwa secara konsepsi tidak terbukti di Provinsi Riau, bahwa daerah dengan tingkat pendapatan per kapita yang tinggi dan produksi beras yang baik akan menjamin penduduknya terbebas

dari rawan pangan. Hal ini berarti aksesibilitas pangan rumah tangga terhadap pangan tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi dan aspek fisik rumah tangga, tetapi juga dipengaruhi oleh akses sosial (Patric and Rogers, 2003), budaya (Suhardjo, 1989). Aksesibilitas ekonomi berhubungan dengan kemampuan ekonomi seseorang untuk mendapatkan pangan sedangkan aksesibilitas fisik berhubungan dengan ketersediaan pangan, tingkat isolasi daerah (sarana dan prasarana distribusi) (Hanani, 2012).

Temuan empiris tersebut juga menunjukkan bahwa ketersediaan pangan yang sudah aman di tataran nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, tidak menjamin tercapainya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga (Rahman, 2010). Ketersediaan pangan yang cukup atau berlebih pada suatu daerah, tanpa didukung dengan kemampuan akses pangan yang baik, akan berakibat pada pemanfaatan pangan yang rendah. Terdapat 100 kabupaten di Indonesia yang belum mampu mencapai ketahanan pangan meskipun produksi pangan berlimpah (Akhmad, 2012). Kondisi ini merupakan wujud dari implementasi beberapa kebijakan ketahanan pangan yang belum padu dan bersinergi dengan kebijakan pembangunan lainnya, sehingga kondisi ketahanan pangan di Indonesia saat ini masih menghadapi ancaman yang tidak ringan (Darwanto, 2005).

Upaya peningkatan aksesibilitas pangan merupakan isu pembangunan yang kurang mendapatkan perhatian dalam dunia perencanaan dan pembangunan (Hubbard, G.O, 2011). Tanpa berpretensi mengabaikan aspek atau pilar ketahanan pangan yang lainnya, aksesibilitas rumahtangga terhadap pangan merupakan faktor kunci bagi pencapaian ketahanan pangan di Indonesia, oleh sebab itu aksesibilitas terhadap pangan menjadi isu yang patut dikedepankan

Aksesibilitas pangan yang terbatas akan berakibat pada kesulitan untuk mencukupi pangan yang bermutu dan bergizi, sehingga akan menghambat kesinambungan ketahanan pangan. Jumlah dan kualitas pangan yang dibutuhkan seorang acapkali bervariasi antara satu dan lainnya. Oleh karena itu upaya penguatan ketahanan pangan, perlu memperhatikan hal-hal terkait dengan aksesibilitas penduduk, rumah tangga dan individu terhadap pangan, berupa aksesibilitas secara ekonomi, fisik, sosial dan budaya. Sehingga dibutuhkan studi komprehensif aksesibilitas rumah tangga terhadap beras di Provinsi Riau.

1.2. Rumusan Masalah

Akses pangan (*food access*) atau kemudahan memperoleh pangan (*food accessibility*) menunjukkan jaminan bahwa setiap rumah tangga dan individu mempunyai sumberdaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai dengan norma gizi. Kondisi tersebut tercermin dari kemampuan rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan produksi pangan (Chung, et al, 1997).

Ketersediaan pangan cukup tinggi pada suatu wilayah/ daerah cenderung akan memberikan gambaran situasi konsumsi pangan yang lebih baik pula . Jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi (ketersediaan pangan) selama periode 2013 hingga 2017 di Provinsi Riau rata-rata mencapai 3.254 Kkal/kapita/hari, sedangkan kemampuan konsumsi baru mencapai 1.992 Kkal/kapita/hari. Masih rendahnya tingkat akses pangan oleh penduduk di Riau juga dapat dilihat dari masih tingginya persentase penduduk yang mengalami kerawanan pangan, yang tersebar diseluruh wilayah. Baik pada wilayah yang mempunyai pendapatan per kapita tinggi, wilayah produksi pangan dan dan wilayah dengan persentase penduduk miskin tinggi. Bukti empiris di Provinsi Riau ini, menunjukkan bahwa jumlah pangan yang tersedia, belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan atau diakses oleh masyarakat. Hal ini memberikan gambaran bahwa implementasi program ketahanan pangan, belum efektif mengatasi permasalahan ketahanan pangan yang ada di provinsi Riau.

Sejumlah studi menunjukkan walaupun ketersediaan di tingkat wilayah mencukupi, tapi tidak selalu menjamin ketahanan pangan ditingkat rumah tangga dan individu. Mengingat ketahanan pangan juga merupakan konstruksi sosial, sehingga proses sosial dan budaya yang menentukan aksesibilitas pangan perlu dilihat secara mendalam. Kemampuan rumah tangga untuk memperoleh pangan selain berhubungan dengan kemampuan ekonomi rumah tangga, akses fisik, juga ditentukan oleh akses sosial dan budaya pangan rumah tangga. Artinya aksesibilitas pangan antara daerah satu dengan daerah lainnya dapat berbeda tergantung sumberdaya baik ekonomi, fisik, sosial dan budaya wilayah setempat. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana aksesibilitas rumah tangga terhadap beras di Provinsi Riau”.

Secara rinci rumusan masalah penelitian ini diuraikan dalam dua pertanyaan pokok berikut :

1. Bagaimana tingkat aksesibilitas rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan beras di Provinsi Riau.
2. Bagaimana faktor budaya pangan, kemampuan sosial, ketersediaan fisik dan ekonomi mempengaruhi tingkat aksesibilitas rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan beras di Provinsi Riau

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah menemukan tingkat aksesibilitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas rumah tangga terhadap beras di Provinsi Riau, yang secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat aksesibilitas rumah tangga terhadap beras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2. Menganalisis pengaruh faktor budaya pangan, kemampuan sosial, ketersediaan fisik dan ekonomi terhadap tingkat aksesibilitas rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan beras.

Berdasarkan dua tujuan tersebut, studi ini dapat memberikan implikasi kebijakan dalam upaya meningkatkan aksesibilitas rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara lebih komprehensif, sehingga jumlah penduduk yang mengalami rawan pangan dapat dikurangi setiap tahunnya.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat berupa:

1. Secara konseptual, penelitian ini akan menemukan faktor-faktor yang secara teoritis-empirik berkaitan dengan aksesibilitas beras di tingkat mikro atau rumah tangga, sehingga temuan ini akan memberikan sumbangan pemikiran baru dalam upaya memberi arah kebijakan peningkatan aksesibilitas rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangannya.
2. Secara praktis, pemikiran baru yang dibangun dari hasil penelitian ini dapat menjadi kerangka konseptual yang penting bagi pengambil kebijakan, baik di pusat maupun di daerah, dalam penyusunan konsep pengembangan aksesibilitas pangan masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Rekomendasi

yang dibangun dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait dalam penyusunan program dan kegiatan aksesibilitas pangan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia pada umumnya, dan di Provinsi Riau khususnya. Hasil penelitian dan impiasinya, dapat menjadi bahan informasi bagi pemegang kebijakan dan masyarakat dalam meningkatkan kepedulian terhadap pembangunan ketahanan pangan.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Terdapat dua kegiatan utama dalam penelitian ini yakni : 1. Menganalisis aksesibilitas rumah tangga terhadap beras, 2) Menganalisis keterkaitan faktor ekonomi, fisik, sosial dan budaya pangan terhadap aksesibilitas rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan beras. Pertimbangan beras dijadikan obyek penelitian karena beras hingga saat ini masih merupakan pangan pokok masyarakat di Indonesia, beras mempunyai kontribusi sekitar 80 persen sebagai sumber karbohidrat utama dalam pola konsumsi masyarakat, (Suryana, dkk, 2014), dari aspek nutrisi, ekonomi, sosial dan budaya, beras tetap merupakan pangan terpenting bagi masyarakat Indonesia (Arifin, 2007)

1.6. Kebaruan Penelitian

Keterjaminan akses sepanjang waktu terhadap pangan yang cukup merupakan inti dari definisi ketahanan pangan rumah tangga. Permasalahan aksesibilitas rumah tangga terhadap beras merupakan masalah multidimensi dan holistik. Aksesibilitas rumah tangga terhadap beras merupakan kemampuan dan kemauan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan beras rumah tangga. Banyak penelitian yang telah dilakukan namun umumnya penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek ekonomi dan fisik saja.

Secara khusus, studi ini telah mencoba membangun bukti empirik sebuah proposisi dimana aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan, tidak hanya akan tergantung pada kondisi ekonomi dan sarana prasarana fisik saja, tetapi juga ditentukan oleh aspek sosial dan budaya pangan dari masyarakat itu sendiri. Pada aspek sosial terutama terletak pada sistim sosial kelembagaan dalam masyarakat, termasuk pendidikan dan pengetahuan pangan dan gizi ibu rumah tangga sebagai

pengambil keputusan. Sementara pada aspek budaya pangan terutama terkait dengan kebiasaan sehari-hari masyarakat yang terkait dengan pola konsumsi pangannya, preferensi dan aksesibilitas terhadap keragaman pangan.

